



# RENCANA KERJA TAHUN 2023



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI BENGKULU**

**TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunianya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu telah dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu ini adalah amanat Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan rencana aksi dari Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan, sekaligus sebagai Akuntabilitas dalam Pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan yang akan dicapai pada tahun bersangkutan dan merupakan Implementasi dari program/kegiatan pusat dan daerah.

Kami menyadari bahwa, dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kiranya saran, masukan dan rekomendasi konstruktif dari semua pihak sangatlah kami perlukan guna melengkapi kekurangan untuk penyempurnaan.

Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Bengkulu

**Ir. YENITA SYAIFUL, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640601 199103 2 002

DAFTAR ISI

	Hal
Cover	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1      Latar Belakang .....	1
1.2      Landasan Hukum .....	2
1.3      Maksud dan Tujuan .....	4
1.4      Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II      EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1      Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	6
2.2      Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3      Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ..	13
2.4      Rancangan Awal RKPD.....	13
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1      Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	24
3.2      Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	29
3.3      Rencana Program dan Kegiatan.....	32
3.4      Uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.....	43
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>55</b>

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Tahun (Tahun Berjalan) Provinsi Bengkulu.....	07
Tabel 2.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Provinsi Bengkulu UPTD Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang.....	14
Tabel 2.3 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Provinsi Bengkulu .....	17
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 UPTD PPMB .....	44
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Provinsi Bengkulu .....	48

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang industri dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023. Untuk mendapatkan keselarasan antara RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2023, yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 serta Review dan Dokumen Perencanaan lainnya.

Rencana Kerja OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2023 yang disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2023 juga merupakan pedoman untuk penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2023 serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Rev-2 Tahun 2021-2026, RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2022.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah



- Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
  14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
  17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs Daerah Provinsi Bengkulu;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 7.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud dan penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk tahun 2023. Secara khusus Rancangan Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dan hasil Rakorbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
- b. Menjadikan Renja sebagai acuan dalam perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
- c. Sebagai acuan bagi seluruh stakeholder Perindustrian dan Perdagangan dalam memadukan kegiatan – kegiatan Pengembangan Industri dan Perdagangan di Provinsi Bengkulu dan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pihak – pihak lainnya dalam mengambil keputusan;
- d. Menyelaraskan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun kedepan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



a. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Mengemukakan pengertian ringkas mengenai RENJA Perangkat Daerah, proses penyusunan RENJA, Keterkaitan antara RENJA PD dengan dokumen RKPD, RENSTRA PD, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

b. Bab II. Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bagian ini menguraikan tentang kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

c. Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

d. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Bidang, baik keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Program/(Outcomes)/Kegiatan Output. Evaluasi RENJA dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan RENJA yang direncanakan.

Di samping itu Evaluasi RENJA dari masing-masing Unit Kerja/Bidang lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022. Evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan RENJA dititik beratkan pada pencapaian realisasi Capaian Program dan Kegiatan dari Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Bidang sesuai tugas dan kewenangannya dibandingkan dengan Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-OPD) Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Pada Renja ini dapat diketahui program kegiatan yang berhasil memenuhi target dan belum memenuhi target sampai dengan tahun 2022.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini, dan berdasarkan tabel 2.1 ini maka dapat diketahui program kegiatan yang berhasil memenuhi target dan belum memenuhi target sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah  
s/d Tahun 2026 (Tahun Berjalan) Provinsi Bengkulu**

**OPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program ( RENSTRA-OPD) 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan ( RENJA-OPD) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-OPD S/d Tahun Berjalan	
						Target Kinerja OPD Tahun 2022	Realissi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realissi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = ( 8/7 )	10	11 = ( 6 + 8 + 10 )	12 = ( 11 / 5 )
3.30.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Jumlah Teknis Pelayanan Admnistrasi Umum yang Dilaksanakan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>60,00</b>
3.30.01.1.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Akreditasi UPTD PPMB</b>									
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang disediakan	Jenis	19	3	3	3	100	3	9	47,37
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	10	2	2	2	100	2	6	60,00
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	10	2	2	2	100	2	6	60,00
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan (UPTD PPMB)	Kali	23	3	3	3	100	3	9	39,13
3.30.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi umum</b>	<b>Jenis</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>25,00</b>
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis surat menyurat disediakan	Jenis	10	2	2	2	100	2	6	60,00
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	Jenis	15	3	3	3	100	3	9	60,00
3.30.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan/dibangun/ direhab/dipelihara</b>	<b>Bulan</b>	<b>72</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>37,50</b>
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Jenis	18	3	3	3	100	3	9	50,00

3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Kestabilan Harga	Persen	24,6	5	5		0	5	10	40,65
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Fasilitas pengendalian Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Peting Tingkat Provinsi	Kab/Kota	46	6	6		0	6	12	26,09
		Jumlah informasi harga dan stok Bapokting	Dokumen	72	12	12		0	12	24	33,33
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Barang Pokok dan Barang penting yang dipantau	Barang	235	-	47	47		-		
		Jumlah Pasar Murah yang dilaksanakan	Kali	40	6	10	6	60	6	18	45,00
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Jumlah	80	40	40		0	40	80	100,00
		Indeks Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang	Persen	95	40	80		0	40	80	84,21
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase	100	4	75		0	4	8	8,00
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Produk	105	10	15	10	67	2	22	20,95
		Jumlah kasus Perlindungan Konsumen yang diselesaikan	Kasus	50	5	10	5	50	2	12	24,00

3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Produk	30	3	4		0	3	6	20,00
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Mutu Produk yang di Verifikasi	Kali	29	4	4	4	100		8	27,59
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Layanan Pengujian yang dilaksanakan	Kali	29	4	4	4	100	1	9	31,03
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komuditi Ekspor	Jumlah	9	1	0		0	1	0	0,00
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Ekspor / Impor	Kegiatan	9	1	0		0	1	0	0,00
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra	Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Ekspor melalui Pameran	Kali	10	2	2	2	100	1	0	0,00
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100		0,00	100	100	100
		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik									
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya									
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang disusun									
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang disusun	Dok	36	5	5	5	100	5	15	41,67
		Jumlah Jenis Dokumen Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran yang disusun	Dok	18	3	3	3	100	3	9	50,00
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang disusun	Dok	30	6	6	6	100	5	17	56,67
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran yang disusun	Dok	15	3	3	3	100	3	9	60,00

3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan yang dibuat, disusun dan dilaporkan	Bulan	70	14	14	14	100	14	14	20,00
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	70	14	14	14	100	14	14	20,00
3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Petugas Penatausahaan Administrasi Keuangan yang dibayar	Orang	60	12	12	12	100	12	12	20,00
		Jumlah Pengelola Website yang dibayar	Orang	36	6	6	6	100	6	6	16,67
3.31.01.1.03	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Kebutuhan BMD dan aset yang dimiliki SKPD	Dok	6	5	5	2	40	5	5	83,33
3.31.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Petugas Aset BMD yang dibayar	Orang	10	2	2	2	100	2	6	60,00
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	Persen	100				0			
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	15	3	3	3	100	3	9	60,00
3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan yang Disediakan	Jenis	40	5	5	5	100	3	13	32,50
3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	30	6	6	6	100	6	18	60,00
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	10	3	3	3	100	2	8	80,00
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	10	2	2	2	100	2	6	60,00
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kali	420	80	80	80	100	50	210	50,00
3.31.01.1.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3.31.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Jenis	16	3	3	3	100	1	7	43,75



3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	18	14	14	14	100	14	14	77,78
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan	Jenis	10	2	2	2	100	2	6	60,00
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Jasa Air dan Jasa Listrik yang dibayar	Jenis	15	3	3	3	100	3	9	60,00
3.31.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	100	20	20	20	100	25	65	65,00
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga THL yang dibayarkan	Orang	140	30	30	30	100	36	96	68,57
		Jumlah jasa Publikasi dan Dokumentasi yang tersedia	Jenis	10	2	2	2	100	2	6	60,00
3.31.01.1.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	54	9	9		0	9	18	33,33
3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	45	9	9	9	100	9	27	60,00
		Jumlah Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas yang Dibayar	Unit	45	9	9	9	100	9	27	60,00
3.31.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	1	1	100	0	1	100,00
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan gedung Kantor yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala	Unit	100	20	20	20	100	7	47	47,00
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala									
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar	Persen	22,8	3,6	3,6		0	3,6	7,2	31,58
		Persentase Penuhmbuhan Industri Kecil Menengah	Persen	6	1	1		0	1	2	33,33
3.31.02.10.1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri Provinsi	Dok	24	10	10		0	10	20	83,33
		Jumlah Unit Usaha Baru IKM	Unit	690	100	100		0	100	200	28,99
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Kajian, Kerjasama dan Promosi Investasi Industri	Dok	12	1	1	1	100	3	5	41,67
		Jumlah Dokumen Rekomendasi teknis rencana pembangunan industri	Dok	9	0	1	0	0	3	3	33,33
		Jumlah Dokumen Penyusunan Master Plan Kawasan Industri	Dok	8	0	2	0	0	3	3	37,50

3.31.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah SDM IKM yang ditingkatkan kapasitasnya	IKM	150	20	20	20	100	3	43	28,67
		Jumlah Sarana dan Prasarana IKM yang ditingkatkan jumlahnya	unit	1	0	0	0	0	3	3	300,00
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kelompok Pengrajin dan Usaha Bersama yang dibina (Dekranasda)	Kelompok	33	4	4	4	100	3	11	33,33
		Jumlah IKM dan sentra yang Berpotensi yang dibina	Sentra	8	1	1	1	100	1	3	37,50
		Jumlah fasilitas Sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI)	Sertifikat	250	40	40	40	100	60	140	56,00
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Nilai Realisasi Investasi Industri	Rupiah (Milyar)	336,00	24,00	24,00		0	24,00	48	14,29
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan komitmen yang di keluarkan	Dok	106	6	6		0	6	12	11,32
		Cakupan Binaan Perusahaan Industri besar	Perusahaan	102	43	43		0	43	86	84,31
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pemeriksaan pemenuhan komitmen IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Perusahaan Provinsi Bengkulu	Dok	97	6	9	6	67	6	18	18,56
		Jumlah Pengawasan pada perusahaan industri yang menjadi kewenangan Provinsi	Perusahaan	90	12	12	12	100	43	67	74,44
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Perusahaan industri Dalam Sinas	Persen	100	30	30		0	30	60	60,00
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data Industri besar yang terdaftar dalam SIINas	Laporan	106	6	6		0	6	12	11,32
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Perusahaan secara berkala menginput data industri	Laporan	97	8	9	8	89	6	22	22,68
		Jumlah Dokumen Informasi dan analisis Industri Provinsi Bengkulu	Dok	15	2	3	2	67	3	7	46,67
		- Jumlah Hasil Pantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan	Perusahaan	15	3	3	3	100	3	9	60,00

Untuk program kegiatan yang belum memenuhi target di tahun 2021 di karenakan dampak dari Pandemi Covid 19 yang masih mewabah di Propinsi Bengkulu sehingga berdampak pada keuangan dan pendapatan daerah.

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sudah mempunyai tolak ukur dan indikator kerja yang sudah ditentukan dalam Renstra. Dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kepala OPD sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka dapat diketahui bahwa OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mengurus urusan pilihan di urusan bidang industri.

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sehubungan dengan hasil kinerja pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu terhadap semua stakeholder seperti tersebut di subbab Analisis Kinerja Pelayanan OPD di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu tidak memiliki standar pelayanan minimal (SPM).

## 2.4. Rancangan RKPD

RKPD telah memuat program dan kegiatan dan telah disusun melalui proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan mengacu pada visi dan misi serta pencapaian tahun 2023. Seiring dengan perkembangan, terjadi proses penyesuaian yang dilakukan OPD untuk menjawab dinamika yang terjadi. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan tentunya harus tetap mengacu pada visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu setelah melakukan analisis terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan kebutuhan dan isu/permasalahan terkini melakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa program/kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal Renja Dinas perindustrian dan perdagangan Povinsi Bengkulu.

Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Povinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.2 dan Berikut di Bawah ini :

Tabel 2.2

## Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Provinsi Bengkulu

## OPD : UPTD Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	Misi Ke dan Program Unggulan Ke
					2022	2023	2024			
						Target	Target			
1	2		3	4	5	6	8	10	11	12
3.30/3.31	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH							Perindag	Bengkulu	
	TUJUAN 2 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH		Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	2	2,2	2,4	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
	MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Rupiah (Milyar)	8500	9000	9500	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bidang Perindustrian dan Perdagangan yang di laksanakan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bidang Perindustrian dan Perdagangan yang di laksanakan	Persentase	100	100	3	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	0	2				
3.30.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	0	1				
3.30.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	0	1				

3.30.01.1.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jenis</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>A</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	4	Perindag	Bengkulu	<b>Misi Ke 1</b>
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	Perindag	Bengkulu	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	Perindag	Bengkulu	<b>Misi Ke 1</b>
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	5	5	Perindag	Bengkulu	
3.30.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang disediakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
<b>3.30.01.1.08.01</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	2	Perindag	Bengkulu	
<b>3.30.01.1.08.02</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	1	3	Perindag	Bengkulu	<b>Misi Ke 1</b>
3.30.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
<b>3.30.01.1.09.06</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	4	Perindag	Bengkulu	

3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang	Indeks Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang	persen	80	85	10	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Produk	4	5	6	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/Persyaratan Teknis yang Berlaku	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	3	4	6	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	3	4	6	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Meningkatnya Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	2	2		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat		2		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
Jumlah										



Tabel 2.3

## Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RKPD ) Tahun 2023 Provinsi Bengkulu

## OPD : Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	Misi Ke dan Program Unggulan Ke
					2022	2023	2024			
						Target	Target			
1	2		3	4	5	6	8	10	11	12
3.30/3.31	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH							Perindag	Bengkulu	
	TUJUAN 2 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH		Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	2	2,2	2,4	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
	MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Rupiah (Milyar)	8500	9000	9500	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan Sesuai Standar	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Standar	Persen	0	20	25	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Sarana Pusat Distribusi Provisnis yang dibangun dan di Kelola	Jumlah Pusat Distribusi Provisnis yang dibangun dan di Kelola	Unit		1	3	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit		1	1			Program Prioritas
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	0	2	12	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1

3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Kestabilan Harga	Persen	4,5	4	230.000.000,00	4	225.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Infomasi harga dan stok Bapokting	Jumlah infomasi harga dan stok Bapokting	Dokumen		12	230.000.000	12	225.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1 dan Program Ke 11 dan 12
3.30.04.1.02.01	Pemantaua Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	30.000.000	12	40.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	Laporan	1	200.000.000	1	185.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Jumlah Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Jumlah	6	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Produk yang diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Jumlah	6	10	60.000.000,00	10	60.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	6	1	60.000.000,00	10	60.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
B.2	SASARAN 3 : MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN LUAR NEGERI		NILAI EKSPOR	US \$ (Juta)	180	190	223.324.000	200	200.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
			PERSENTASE PENINGKATAN NILAI EKSPOR	Persen	10	11		12,2		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Jumlah Komuditi Ekspor	Jumlah Komuditi Ekspor	Produk	7	8	223.324.000	8	200.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1

3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Dagang yang dilakukan melalui pameran dan Misi dagang		Dokumen	1	1	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	2	4	4	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	0	2	2	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	0	0	2	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	0	10	20	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3,31	<b>TUJUAN 1 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH</b>		<b>Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian Terhadap PDRB</b>	<b>Persen</b>	<b>3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
A.2	<b>MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD</b>		<b>NILAI SAKIP</b>	<b>Nilai</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3,1	<b>MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD</b>		<b>NILAI SAKIP</b>					<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bidang Perindustrian dan Perdagangan yang di laksanakan</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bidang Perindustrian dan Perdagangan yang di laksanakan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	Dokumen	14	14	14	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	10	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	3	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1

3.31.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Administrasi Keuangan yang dibuat, disusun dan dilaporkan</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang dibuat, disusun dan dilaporkan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	14	Perindag	Bengkulu	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	Perindag	Bengkulu	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.03	<b>Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Perencanaan Kebutuhan BMD dan aset yang dimiliki SKPD</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	Perindag	Bengkulu	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		3	5	Perindag	Bengkulu	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jenis</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	1	1	10	Perindag	Bengkulu	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	3	Perindag	Bengkulu	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	10	Perindag	Bengkulu	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	6	Perindag	Bengkulu	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	2	Perindag	Bengkulu	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	2	Perindag	Bengkulu	<b>Misi Ke 1</b>

3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	85	85	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1				Misi Ke 1
3.31.01.1.07	<b>Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Jenis</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	<b>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</b>	<b>Unit</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	1		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	4	3	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang disediakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	2	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	3	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	20	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	30	35	35	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1

3.31.01.1.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Unit	29	30	121.000.000	29	120.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	85.000.000	9	90.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	26.000.000	20	30.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	10.000.000			Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3,31	SASARAN 2 : MENINGKATNYA NILAI PRODUKSI INDUSTRI		Nilai Produksi Industri Besar	Rupiah (Milyar)	11000	11500	1.605.000.000	11700	1.100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
			Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Rupiah (Milyar)	150	200		250		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Terlaksananya Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar	Persen	6,8	10,2	1.525.000.000,00	11.1	900.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
			Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Persen	4	4,5		5		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02.10.1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri Provinsi	Dok	1	1	1.525.000.000,00	1	900.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
			Jumlah Unit Usaha Baru IKM	Unit	100	20		120		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	3	3	125.000.000	3	400.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	0	0	-	3	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	5	4	1.400.000.000	5	400.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1 dan Program Ke 11 dan 12



# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		Nilai Realisasi Investasi Industri	Rupiah (Milyar)	63	105	40.000.000	126	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Perizinaan Usaha dan Pengawasan	Dokumen	1	1	40.000.000	20	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2	40.000.000	20	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terpantaunya Perusahaan Industri Dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Dokumen	1	1	40.000.000,00	39	100.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	40.000.000,00	20	100.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	3	3	40.000.000	20	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
Belanja Pegawai							9.873.717.000		10.330.640.000			
Belanja Barang Jasa + Modal							4.603.360.000		4.100.860.000			
Jumlah							14.477.077.000		14.431.500.000			

**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional****3.1.1 Telahaan terhadap RPJP Provinsi Bengkulu 2005 – 2025**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025, sektor industri merupakan motor penggerak terwujudnya perekonomian yang berdaya saing tinggi. Untuk itu pengembangan industri berbasis sumber daya yang mengolah secara efisien dan rasional kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan daya dukung dan mengembangkan pola jaringan rumpun industri (industrial cluster) sebagai fondasinya harus dicapai serta pada akhirnya sektor perindustrian harus menjadi basis aktivitas ekonomi.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi, arah pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

**1) Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro**

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas melalui penguasaan, penyebaran, penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan; mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik, dan mengelola secara berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah.

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, pariwisata, kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara efisien, modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan tatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Perdagangan diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan: (a) berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam

negeri, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau.

2) Revitalisasi Pertanian

Sektor perindustrian berbasis pertanian menjadi basis aktivitas ekonomi. Agroindustri menjadi motor penggerak perekonomian Provinsi Bengkulu

3) Meningkatkan Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Meningkatnya peranan ekonomi kerakyatan sebagai komponen utama pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Peranan UMKM perlu ditingkatkan agar memiliki daya saing yang tinggi sehingga dapat menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan dan memperkuat basis ekonomi daerah.

Pengembangan UMKM dan koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEK, dan berdaya saing. Untuk itu pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi, perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

Pengembangan UMKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM. Sebagai pelaku ekonomi, UMKM perlu diberi kemudahan akses terhadap lembaga-lembaga permodalan sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya.

4) Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK di Provinsi Bengkulu dimaksudkan untuk menjadikan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK sebagai pedoman umum kebijakan daerah kesejahteraan masyarakat dengan fokus kajian pada agribisnis dan agroindustri sebagai lokomotif pembangunan. Dunia usaha perlu dilibatkan dalam pembangunan IPTEK agar produk-produk riset dapat dikembangkan menjadi industri-industri yang berdaya saing tinggi.

5) Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya (*Resource-Based Industries*)

Dukungan dan pengembangan industri berbasis sumber daya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri yang bermuara pada terciptanya sistem ekonomi biaya rendah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Industri dikembangkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang tersedia sehingga dapat menekan biaya produksi. Upaya ini dapat menghasilkan sistem perekonomian daerah berdaya saing tinggi di era globalisasi.

Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, perlu membangun fondasi kegiatannya dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat dengan 3 (tiga) prinsip dasar: (1) pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulu, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) Penguatan hubungan antar-industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas (*Metrology, Standardization, Testing and Quality/MSTQ*), serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.

Pembangunan industri berbasis sumber daya diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (*good corporate governance*). Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri berskala besar.

Pengembangan industri yang berbasis SDA diarahkan pada upaya mengembangkan diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA agar mampu meningkatkan nilai tambah, termasuk untuk meningkatkan daya saing dalam merebut pasar global. Namun pemanfaatan SDA sebagai basis industri harus tetap memperhatikan aspek pemeliharaan SDA sebagai basis

industri harus tetap memperhatikan aspek pemeliharaan SDA yang ada dan sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Masyarakat lokal harus tetap diberi akses terhadap pemanfaatan SDA di sekitarnya untuk pengembangan industri dalam rangka meningkatkan penghasilan dan pendapatan mereka.

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal.pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dan investasi SDM.

#### 6) Pengembangan Wilayah

Selama kurun waktu 20 tahun ke depan industri rakyat diharapkan mampu menjadi ujung tombak pembangunan. Industri rakyat yang dikembangkan hendaknya berbasis pada potensi sumber daya lokal yang terdapat di setiap kabupaten dan kota. Berikut ini diuraikan alternatif pengembangan industri rakyat di masing-masing kabupaten dan kota.

- Kota Bengkulu dapat berperan dalam pengembangan SDM melalui sektor pendidikan.
- Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi perkebunan yang sangat signifikan untuk dijadikan penggerak utama pembangunan.
- Kabupaten Muko-Muko memiliki potensi yang relatif sama dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dalam pengembangan komoditi hortikultura.
- Kabupaten Lebong memiliki karakteristik wilayah yang khas karena sebagian besar wilayahnya merupakan taman nasional, hutan lindung dan cagar alam.
- Kabupaten Kepahiang memiliki potensi agrowisata yang dapat dikembangkan sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat dan daerah.

- Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berperan dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri berbasis perkebunan dan tanaman bahan pangan.
- Kabupaten Seluma memiliki beberapa sentra produksi palawija terutama jagung yang berpotensi untuk dikembangkan pada skala agribisnis dan agro industri.
- Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang sangat tinggi sehingga dapat dikembangkan pada skala agribisnis dan industri.

7) Menerapkan dan Mentaati Aturan Tata Normal Baru

Dalam rangka melaksanakan kebijakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025, Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan pada RPJMD ke- 4 yaitu sebagai berikut:

RPJM ke-4 ( 2021-2026)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3 ,RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil, demokratis bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertakwa serta perekonomian kokoh, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, unggul dan bertakwa serta berdaya saing. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang.

Sumber daya manusia Provinsi Bengkulu yang unggul dan bertakwa adalah sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman,

bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi lptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta mitigasi bencana untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan peningkatan kemampuan lptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi, pos dan telematika yang handal; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan



disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran strategis dalam mempertimbangkan sumber daya, kondisi situasi saat ini, dan kemampuan yang dimiliki, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang industri dan perdagangan.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD pemerintah Provinsi Bengkulu.

- Misi ke-1 : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif**
- Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
- Sasaran ke-1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri terhadap perekonomian daerah



Sasaran ke-2	Meningkatnya pertumbuhan perdagangan terhadap perekonomian daerah
Strategi ke-1	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan IKM</li> <li>- Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri</li> <li>- Pengembangan inovasi teknologi produksi</li> <li>- Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran dan standardisasi produk</li> <li>- Peningkatan nilai produksi dan investasi perusahaan sedang besar</li> </ul>
Strategi ke-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga stabilisasi harga</li> <li>- Meningkatkan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya sain</li> <li>- Optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk</li> <li>- Peningkatan standar dan mutu prduk ekspor, dan peningkatan promosi luar negeri);</li> </ul>
Arah Kebijakan ke-1	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan dukungan penguatan SDM</li> <li>- Peningkatan daya saing produk industri</li> <li>- Pengembangan penguasaan teknologi dan inovasi</li> <li>- Pengembangan wilayah pertumbuhan industri</li> <li>- Penerapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</li> </ul>
Arah Kebijakan ke-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan operasi pasara dan pelaksanaan pasar murah</li> <li>- Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen</li> <li>- Peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online</li> <li>- Penguatan UPTD PPMB dalam pengujian mutu produk daerah</li> </ul>

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana tergambar diatas, pembangunan sektor industri dan perdagangan diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Bengkulu yang sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Bengkulu harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi otonomi daerah. Dalam hal ini, sektor industri dan perdagangan harus mampu meningkatkan daya saingnya, sehingga bisa menjadi pemenang di negeri sendiri maupun regional.

b. Aspek Kultural

Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Bengkulu harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa

c. Aspek Teknologi

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.

d. Aspek Kelembagaan

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu membangun kapasitas antara lembaga/institusi pembina sektor industri dan perdagangan dengan sektorsektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah

e. Aspek Perencanaan

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.

### 3.3 Rencana Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Telahaan terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah “BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT”

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, dan hebat adalah (1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas dan Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar

dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia. (2) Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan. (3) Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur)

Visi tersebut diwujudkan melalui lima misi berikut:

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk Mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;
2. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religious;
5. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak secara terpadu

Misi yang terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan adalah misi kesatu, yaitu

***“Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk Mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif”.***

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang maju, sejahtera, dan hebat melalui program prioritas (1) Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing (2) Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi

### **3.3.2 Telahaan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)**

Dalam rangka mendorong Pembangunan industri dan perdagangan melalui penguatan struktur industri dan perdagangan yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya alam secara optimal, efisien, mendorong penyebaran industri dan penguatan perdagangan dalam

negeri serta peningkatan perdagangan luar negeri, maka apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan dengan memperhatikan urusan pemerintahan bidang industri dan perdagangan sesuai dengan UU nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beberapa urusan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Industri

- Menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi  
Rencana pembangunan industri provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi disusun paling sedikit memperhatikan potensi sumber daya daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
- Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri  
Melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan, melalui:
  - 1) Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
  - 2) Pengembangan kawasan peruntukan Industri;
  - 3) Pembangunan Kawasan Industri; dan
  - 4) Pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah
- Penjaminan Ketersediaan dan Penyaluran SDA untuk Industri Dalam Negeri.  
Menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri dan mengatur pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri. Pengaturan pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan melaksanakan pemetaan kebutuhan SDA sebagai bahan baku industri baru yang akan dibangun dalam rangka hilir isasi industri berbasis SDA.
- Pengembangan, Peningkatan Penguasaan dan Pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri

Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri dengan memfasilitasi:

- 1) Kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- 2) Promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau;
- 3) lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan sub urusan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana strategis litbang di balai penelitian, penyusunan nota kesepahaman kerjasama penelitian teknologi
  - 2) Implementasi pengembangan teknologi. Teknologi baru melalui pilot plant, jaminan atas resiko pemanfaatan teknologi
  - 3) Meningkatkan kontribusi HAKI
- Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri
- Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:
- 1) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi;
  - 2) Pengembangan sentra Industri kreatif;
  - 3) Pelatihan teknologi dan desain;
  - 4) Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan

- 5) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif
- Penyediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri  
Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri. Pembiayaan hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pembiayaan diberikan dalam bentuk:
    - 1) Pemberian pinjaman;
    - 2) Hibah; dan/atau
    - 3) Penyertaan modal.
  - Penjaminan ketersediaan infrastruktur industri  
Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri dimana pembiayaan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha dan/atau perseorangan. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah hanya dapat diberikan kepada perusahaan industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dalam pembangunan industri hulu/strategis, subsidi bunga pinjaman bagi industri prioritas, penjualan obligasi untuk pembangunan industri tertentu, akses pembiayaan untuk IKM antara lain fasilitas KUR dengan bunga dibawah 10%, reksadana untuk IKM serta modal ventura.
  - Sistem informasi industri nasional  
Dalam implementasi sistem informasi industri nasional, Perusahaan industri/Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data industri/kawasan industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu melalui SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). Adapun kewenangan yang diberikan meliputi sebagai berikut:
    - 1) Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Besar dan Izin perluasannya dan IUKI dan IPKI
    - 2) Pemberian kemudahan sesuai kewenangan kepada perusahaan industri dalam penyampaian data industri dan dalam mengakses informasi.
    - 3) Data SINA paling sedikit memuat (1) data industri, (2) data kawasan industri, (3) data perkembangan dan peluang pasar (4) perkembangan teknologi industri.

- Pembangunan dan Pemberdayaan industri kecil dan menengah  
Dalam hal pelaksanaan sub urusan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah di daerah meliputi sebagai berikut:

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan
- 2) Pemberian fasilitas
- 3) Penumbuhan wirausaha baru

Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, memperkuat struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja, menghasilkan barang/jasa untuk ekspor. Pemberdayaan IKM dilakukan melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

- Fasilitasi Rekomendasi Perizinan  
Dengan menerbitkan rekomendasi perizinan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penerbitan izin usaha industri (IUI) Besar
- 2) Penerbitan izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri besar
- 3) Penerbitan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya litans daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi..

- Peningkatan penanaman modal di bidang industri  
Dalam rangka peningkatan penanaman modal di bidang industri, perlu mendorong penanaman modal di bidang industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri nasional dan peningkatan daya saing industri.

- Pemberian fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri  
Memberikan fasilitas fiskal/non fiskal untuk mempercepat pembangunan industri kepada perusahaan industri tertentu. Fasilitas dapat diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penanaman modal, perusahaan industri yang melakukan litbang teknologi industri dan produk perusahaan industri/perusahaan kawasan industri sebagai berikut:

- 1) Berada di daerah perbatasan atau daerah tertinggal

- 2) Mengoptimalkan penggunaan barang/jasa dalam negeri
- 3) Mengembangkan SDM Industri
- 4) Berorientasi ekspor
- 5) Melakukan upaya industri hijau
- 6) Mengutamakan produk IKM sebagai komponen proses produksi

Fasilitas juga dapat diberikan pada IKM yang menerapkan SNI Wajib, menggunakan SDA secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- Pengawasan dan pengendalian

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri atau kegiatan usaha kawasan industri, meliputi antara lain : SDM Industri, Pemanfaatan SDA, Manajemen energi, manajemen air, SNI, kawasan dan lain – lain. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan bidang perindustrian oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri paling sedikit meliputi (1) sumber daya industri, (2) pemanfaatan SDA, (3) manajemen energi, (4) manajemen air, (5) SNI, (6) data industri dan kawasan industri, (7) standar industri hijau, (8) standar kawasan industri, (9) perizinan industri/kawasan industri, (10) keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

Dalam melaksanakan urusan bidang perindustrian tersebut diatas dan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 maka visi pembangunan industri nasional yaitu “Memantapkan Daya Saing Basis Industri Manufaktur yang Berkelanjutan serta Terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan” dengan fokus prioritas pembangunan industri pada 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat.
2. Fokus Prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global;
3. Fokus Prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek.



Dengan sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya populasi dan persebaran industri

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau jawa dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar pulau jawa. Adapun meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS) maupun industri kecil dan menengah (IKM). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Unit industri pengolahan non-migas besar sedang yang tumbuh.
- b. Unit industri kecil yang tumbuh.
- c. Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas.
- d. Nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional.
- e. Kawasan industri yang terbangun.
- f. Sentra IKM di luar Pulau Jawa yang dibangun dan beroperasi.
- g. Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

2. Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional.
- b. Penguasaan teknologi industri.
- c. Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara Wajib.

- d. SDM Industri kompeten dan bersertifikasi yang terserap di dunia kerja.
- e. Produktivitas SDM industri.

## 2. Bidang Perdagangan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) pokok pikiran, yaitu:

- a. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
- b. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
- c. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 adalah “perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi” melalui:

- a. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan
- b. Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan.
- c. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor
- d. Fasilitasi perdagangan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- e. Pengelolaan impor
- f. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar
- g. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah

Arah kebijakan Perdagangan Luar Negeri akan dicapai melalui strategi yaitu:

### 1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir;
- b. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan
- c. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata

impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018.

2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional, Strategi yang akan ditempuh:

Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan
- b. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.

3. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan peningkatan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok dan penting, maka strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terdapat 3 (tiga) langkah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok
  - b. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok
  - c. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok
- .Berdasarkan sasaran pembangunan industri nasional 2015 – 2035 , maka sasaran pembangunan industri Provinsi Bengkulu 2018 – 2038 guna tercapainya visi misi dan tujuan membangun Bengkulu yang sejahtera dan berdaya saing adalah:
- 1) Meningkatnya pertumbuhan industri Provinsi Bengkulu yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2038 sehingga kontribusi industri dalam PDB mencapai 20,22%.
  - 2) Tercapainya percepatan pertumbuhan industri di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
  - 3) Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu, antara dan hilir berbasis sumber daya alam lokal dan didukung oleh fasilitasi industri jasa

- 4) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional.
- 5) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten, pertumbuhan industri kecil dan menengah
- 6) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan pengembangan inovasi.

Penahapan capaian pembangunan industri unggulan dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Tahapan dan arah rencana pembangunan industri Provinsi Bengkulu diuraikan sebagai berikut:

1) Tahap I (2018 – 2022)

Arah pembangunan industri Provinsi Bengkulu pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, pengembangan IKM dan sentra IKM, meningkatkan penguasaan teknologi, memperkuat industri hulu agro, fasilitasi sarana dan prasarana produksi, perencanaan pengembangan kawasan industri, membangun *brand market* di tingkat nasional.

2) Tahap II (2023 – 2028)

Arah pembangunan industri Provinsi Bengkulu pada tahap ini dimaksudkan untuk semakin memperkuat struktur industri yang didukung dengan sumber daya manusia industri yang memiliki kompetensi pada industri yang memiliki keunggulan komparatif guna mencapai keunggulan kompetitif, pembangunan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri, membangun *brand market* internasional.

3) Tahap III (2029 – 2038)

Arah pembangunan industri Provinsi Bengkulu pada tahap ini untuk perluasan pasar produk unggulan Provinsi Bengkulu di tingkat nasional dan global dan terus mengembangkan inovasi dan teknologi serta pengembangan kawasan industri.

Secara sederhana tahapan pembangunan industri Provinsi Bengkulu tahun 2018 – 2038 diilustrasikan pada Gambar 3.1.



Strategi pembangunan industri daerah, sebagaimana juga nasional adalah tujuan yang ingin dicapai sebagai bagian dari cita-cita daerah yang termaktub dalam visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Menentukan jenis industri andalan, pendukung dan industri hulu, adalah didasarkan pada potensi produksi primer dari sumber daya lokal dan sumbangsihnya terhadap nilai PDRB daerah Provinsi Bengkulu selama ini.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Provinsi Bengkulu dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana industri pada sentra IKM, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri
- 2) Memperkuat keterkaitan agro-hulu dan percepatan penguatan prasarana agro-processing produk sekunder atau produk akhir berbasis keanekaragaman sumber daya lokal
- 3) Membangun iklim usaha yang kondusif, regulasi yang efektif dan efisien
- 4) Penguatan ekosistem bisnis bagi pelaku industri melalui fasilitasi baik *e-promotion* dan *e-commerce* maupun *direct promotion* untuk perluasan pasar sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional.
- 5) Memfasilitasi *start up* melalui inkubator bisnis untuk penguatan kompetensi sumber daya pelaku industri dan *scale up* jaringan bisnis (*network*) dengan stakeholders guna penguatan kemandirian entrepreneur.
- 6) Fasilitasi penguatan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi untuk peningkatan nilai tambah produk industri.

### 3.4 Uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, dan RKPD awal tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program

induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Rincian Program dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ada 2 yaitu Pendanaan Untuk Dinas dan UPTD adalah sebagai berikut:

**a. Program pada Dinas :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
7. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
8. Program Pengembangan Ekspor

**b. Program pada UPTD PPMB:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

TABEL 3.1

**Rencana Kerja Dan Pendanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Perkiraan Tahun 2024 Provinsi Bengkulu**  
**OPD: UPTD Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu**

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	Misi Ke dan Program Unggulan Ke
					2022	2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30/3.31	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH						163.000.000		143.500.000	Perindag	Bengkulu	
	TUJUAN 2 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH		Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	2	2,2	163.000.000	2,4	143.500.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
	MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Rupiah (Milyar)	8500	9000	163.000.000	9500	143.500.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bidang Perindustrian dan Perdagangan yangg di laksanakan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bidang Perindustrian dan Perdagangan yang di laksanakan	Persentase	100	100	73.000.000	3	103.500.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	0	2	13.000.000,00					
3.30.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	0	1	6.500.000,00					
3.30.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	0	1	6.500.000,00					

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

3.30.01.1.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jenis</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>39.000.000</b>	<b>A</b>	<b>44.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	10.000.000	4	15.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	8.000.000	2	8.000.000	Perindag	Bengkulu	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	6.000.000	2	6.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	5	15.000.000,00	5	15.000.000	Perindag	Bengkulu	
3.30.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang disediakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13.500.000</b>	<b>12</b>	<b>47.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	Misi Ke 1
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	5.000.000	2	7.000.000	Perindag	Bengkulu	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	1	8.500.000	3	40.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7.500.000</b>	<b>12</b>	<b>12.500.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	Misi Ke 1
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	7.500.000	4	12.500.000	Perindag	Bengkulu	



3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang	Indeks Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang	persen	80	85	90.000.000,00	10	40.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Produk	4	5	90.000.000	6	40.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/Persyaratan Teknis yang Berlaku	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	3	4	40.000.000	6	20.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	3	4	20.000.000	6	20.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Meningkatnya Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	2	2				Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat		2	30.000.000			Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
Jumlah							163.000.000		143.500.000			

TABEL 3.2

**Rencana Kerja Dan Pendanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Perkiraan Tahun 2024 Provinsi Bengkulu**  
**OPD: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu**

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	Misi Ke dan Program Unggulan K
					2022	2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30/3.31	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH						14.477.077.000		14.431.500.000	Perindag	Bengkulu	
	TUJUAN 2 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH		Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	2	2,2	563.324.000	2,4	610.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
	MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Rupiah (Milyar)	8500	9000	340.000.000	9500	610.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan Sesuai Standar	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Standar	Persen	0	20	50.000.000	25	125.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Sarana Pusat Distribusi Provinsi yang dibangun dan di Kelola	Jumlah Pusat Distribusi Provinsi yang dibangun dan di Kelola	Unit		1	50.000.000	3	125.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit		1	10.000.000	1	50.000.000			Program Prioritas
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	0	2	40.000.000,00	12	75.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Kestabilan Harga	Persen	4,5	4	230.000.000,00	4	225.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Infomasi harga dan stok Bapokting	Jumlah infomasi harga dan stok Bapokting	Dokumen		12	230.000.000	12	225.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1 dan Program Ke 11 dan 12
3.30.04.1.02.01	Pemantaua Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	30.000.000	12	40.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	Laporan	1	200.000.000	1	185.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Jumlah Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Jumlah	6	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Produk yang diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Jumlah	6	10	60.000.000,00	10	60.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	6	1	60.000.000,00	10	60.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
B.2	SASARAN 3 : MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN LUAR NEGERI		NILAI EKSPOR	US \$ (Juta)	180	190	223.324.000	200	200.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
			PERSENTASE PENINGKATAN NILAI EKSPOR	Persen	10	11		12,2		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Jumlah Komuditi Ekspor	Jumlah Komuditi Ekspor	Produk	7	8	223.324.000	8	200.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Dagang yang dilakukan melalui pameran dan Misi dagang		Dokumen	1	223.324.000	1	200.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	2	4	123.324.000	4	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	0	2	50.000.000	2	50.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	0	0		2	20.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	0	10	50.000.000	20	30.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3,31	TUJUAN 1 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH		Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Persen	3	3,2	13.913.753.000	3,4	13.821.500.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
A.2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD		NILAI SAKIP	Nilai	BB	BB	12.308.753.000	BB	12.721.500.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3,1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD		NILAI SAKIP							Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bidang Perindustrian dan Perdagangan yang di laksanakan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bidang Perindustrian dan Perdagangan yang di laksanakan	Persen	100	100	12.308.753.000	100	12.721.500.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	Dokumen	14	14	163.000.000	14	180.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	133.000.000	10	150.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	30.000.000	3	30.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan yang dibuat, disusun dan dilaporkan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang dibuat, disusun dan dilaporkan	Dokumen	14	14	9.973.717.000	14	10.479.500.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	9.873.717.000	14	10.330.640.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100.000.000	12	148.860.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.03	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Kebutuhan BMD dan aset yang dimiliki SKPD	Laporan	1	1	16.000.000	1	17.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	16.000.000	1	17.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Jenis	0	1	20.000.000	1	60.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Orang		3	20.000.000	5	60.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	8	8	620.000.000	8	655.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	1	1	20.000.000	10	30.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	50.000.000	3	70.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	50.000.000	10	55.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	80.000.000	6	80.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	70.000.000	2	70.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	30.000.000	2	60.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	85	200.000.000	85	290.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1	120.000.000					Misi Ke 1
3.31.01.1.07	<b>Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	Jenis	3	19	145.000.000	8	80.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	<b>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</b>	Unit	3	12	25.000.000	6	-	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	1	30.000.000		-	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	4	50.000.000	3	80.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2	40.000.000		-	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang disediakan</b>	Jenis	4	4	1.250.036.000	3	1.130.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	10.000.000,00	2	15.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	240.000.000,00	3	250.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	5.000.000,00	20	55.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	30	35	995.036.000,00	35	810.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

3.31.01.1.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Unit	29	30	121.000.000	29	120.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	85.000.000	9	90.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	26.000.000	20	30.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	10.000.000			Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3,31	SASARAN 2 : MENINGKATNYA NILAI PRODUKSI INDUSTRI		Nilai Produksi Industri Besar	Rupiah (Milyar)	11000	11500	1.605.000.000	11700	1.100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
			Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Rupiah (Milyar)	150	200		250		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Terlaksananya Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar	Persen	6,8	10,2	1.525.000.000,00	11.1	900.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
			Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Persen	4	4,5		5		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02.10.1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri Provinsi	Dok	1	1	1.525.000.000,00	1	900.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
			Jumlah Unit Usaha Baru IKM	Unit	100	20		120		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	3	3	125.000.000	3	400.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	0	0	-	3	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	5	4	1.400.000.000	5	400.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1 dan Program Ke 11 dan 12

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		Nilai Realisasi Investasi Industri	Rupiah (Milyar)	63	105	40.000.000	126	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Perizinaan Usaha dan Pengawasan	Dokumen	1	1	40.000.000	20	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2	40.000.000	20	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terpantaunya Perusahaan Industri Dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Dokumen	1	1	40.000.000,00	39	100.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	40.000.000,00	20	100.000.000,00	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	3	3	40.000.000	20	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
Belanja Pegawai							9.873.717.000		10.330.640.000			
Belanja Barang Jasa + Modal							4.603.360.000		4.100.860.000			
Jumlah							14.477.077.000		14.431.500.000			



## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dilakukan untuk menindaklanjuti Review pada RPJMD, Renstra Dinas, dan Visi Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, serta RKPD Awal tahun 2023 dan Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat sekaligus memberikan solusi bagi pengembangan usaha industri dan perdagangan di Provinsi Bengkulu, namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi di daerah dan nasional. Oleh sebab itu pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat. Dengan demikian dokumen perencanaan ini bersifat fleksibel dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta diupayakan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya RENJA ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja bersama bagi unit-unit pelaksana teknis dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun, saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Dokumen Renja ini untuk masa-masa yang akan datang.

Ditetapkan di               : Bengkulu  
 Pada Tanggal               :  
   Kepala Dinas  
   Perindustrian dan Perdagangan  
   Provinsi Bengkulu

**Ir. YENITA SYAIFUL, M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19640601 199103 2 002